

Pelaksanaan Inklusi di Sekolah SDIT Rahmadiyah Depok

Imam Hasani

STAI Al-hamidiyah Jakarta, Indonesia

Hamam Thoriq Majid

STAI Al-hamidiyah Jakarta, Indonesia

Imran Revanza

STAI Al-hamidiyah Jakarta, Indonesia

George Khatami Albusthomi

STAI Al-hamidiyah Jakarta, Indonesia

Email Korespondensi : imamhasani88@gmail.com¹, hamthor14@gmail.com², revanzaimran09@gmail.com³, georgetomi12@gmail.com⁴

Abstract Children with disabilities face increasing challenges due to society's negative views that limit their social and emotional development and cause many families to feel ashamed and hide them from important social interactions. Education is considered key to ensuring their rights, but exclusive education systems often limit their access with a lack of facilities and teacher training. Inclusive education was identified as a potential solution, allowing them to study in nearby schools without being restricted by special needs, increasing access to education and changing society's view of disability to promote social inclusion and equal rights.

Keywords: Implementation of Inclusion, School.

Abstrak Anak-anak penyandang disabilitas menghadapi tantangan meningkat karena pandangan negatif masyarakat yang membatasi perkembangan sosial dan emosional mereka serta menyebabkan banyak keluarga merasa malu dan menyembunyikan mereka dari interaksi sosial penting. Pendidikan dianggap kunci untuk memastikan hak-hak mereka, tetapi sistem pendidikan eksklusif sering kali membatasi akses mereka dengan kurangnya fasilitas dan pelatihan guru. Pendidikan inklusif diidentifikasi sebagai solusi potensial, memungkinkan mereka belajar di sekolah terdekat tanpa dibatasi kebutuhan khusus, meningkatkan akses pendidikan dan mengubah pandangan masyarakat terhadap disabilitas untuk mendorong inklusi sosial dan kesetaraan hak.

Kata Kunci: Pelaksanaan Inklusi, Sekolah.

PENDAHULUAN

Permasalahan yang dihadapi oleh anak penyandang disabilitas semakin meningkat seiring dengan bertambahnya tekanan dari lingkungan sosial. Anak-anak ini sering mengalami keterbatasan yang sebenarnya bukan hanya disebabkan oleh kondisi fisik atau mental mereka, tetapi juga oleh cara pandang masyarakat yang keliru terhadap disabilitas. Masyarakat seringkali melihat penyandang disabilitas sebagai individu yang tidak mampu, terbatas, dan selalu membutuhkan bantuan serta rasa kasihan. Pandangan ini menciptakan hambatan tambahan bagi anak-anak penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menjadi korban stigma dan diskriminasi, yang berdampak negatif pada kepercayaan diri dan peluang mereka untuk berkembang. Selain itu, banyak keluarga yang merasa malu memiliki anak dengan disabilitas. Mereka cenderung menyembunyikan anak-anak ini dari interaksi

sosial, yang mengakibatkan anak-anak tersebut tidak mendapatkan kesempatan untuk bersosialisasi, bersekolah, dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Hal ini tidak hanya menghambat perkembangan sosial dan emosional mereka tetapi juga membatasi akses mereka terhadap pendidikan dan layanan lainnya yang penting untuk perkembangan mereka.

Akibat dari pandangan masyarakat yang negatif ini adalah anak penyandang disabilitas tidak dapat sepenuhnya menikmati hak-hak mereka dan mengalami kualitas hidup yang lebih rendah. Masalah ini menjadi semakin kompleks karena memerlukan perubahan paradigma dalam masyarakat serta kebijakan yang inklusif untuk mendukung keberadaan dan perkembangan anak-anak penyandang disabilitas. Pendapat ini menunjukkan bahwa masalah sosial yang dihadapi oleh anak penyandang disabilitas sebenarnya disebabkan oleh masyarakat yang memberikan tekanan dan batasan terhadap mereka.

Pandangan masyarakat selama ini cenderung melihat penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki ketidakmampuan dan keterbatasan fisik atau mental, yang dianggap sebagai beban, tidak berguna, dan harus selalu dibantu serta dikasihani. Pandangan negatif ini berakar pada budaya yang masih melekat di masyarakat, di mana beberapa keluarga menganggap memiliki anak disabilitas sebagai sebuah aib. Akibatnya, anak-anak ini seringkali dipingit di rumah, tidak bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, dan tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, yang berdampak buruk pada psikologis dan masa depan mereka.

Pendidikan adalah aspek yang sangat penting bagi anak-anak untuk mencapai kesejahteraan sosial dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Hal ini berlaku bagi semua anak, termasuk mereka yang kurang beruntung secara fisik maupun mental. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun rasa percaya diri, keterampilan sosial, dan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus seringkali mendapat pengecualian dalam sistem pendidikan nasional. Dari sekitar satu juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia, hanya 49.647 yang dapat mengenyam pendidikan formal. Ini berarti bahwa sebagian besar anak-anak dengan kebutuhan khusus tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar di sekolah.

Eksklusivitas dalam sistem pendidikan menutup peluang bagi anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Banyak sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai atau guru yang terlatih untuk menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus. Selain itu, stigma sosial dan pandangan negatif terhadap disabilitas juga turut berkontribusi

pada marginalisasi mereka dalam sistem pendidikan. Akibatnya, anak-anak dengan kebutuhan khusus semakin terpinggirkan. Mereka tidak hanya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang setara, tetapi juga terisolasi dari lingkungan sosial mereka. Hal ini berdampak buruk pada perkembangan pribadi dan sosial mereka, serta mengurangi peluang mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat.

Untuk mengatasi masalah marginalisasi anak penyandang disabilitas dalam sistem pendidikan, diperlukan pendekatan inklusif. Pendidikan inklusif memberikan kesempatan bagi semua anak, tanpa memandang perbedaan fisik, mental, sosial, atau budaya, untuk belajar bersama dalam lingkungan yang sama. Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak hanya meningkatkan akses terhadap pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi juga membantu mengubah pandangan masyarakat terhadap disabilitas dan mendorong inklusi sosial yang lebih luas.

Pendidikan inklusif adalah model pendidikan yang memberi kesempatan bagi siswa berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan siswa lain seusianya yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Pendidikan ini didasarkan pada prinsip bahwa layanan sekolah harus diperuntukkan bagi semua siswa tanpa memandang perbedaan apapun, termasuk kebutuhan khusus, perbedaan sosial, emosional, budaya, maupun Bahasa. Tujuan dari sekolah inklusif adalah untuk mengurangi dampak negatif dari sikap eksklusif serta memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus dan kurang beruntung untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Dengan mengadopsi pendidikan inklusif, sistem pendidikan tidak hanya membuka akses yang lebih luas bagi anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih toleran dan menghargai keberagaman. Hal ini dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, mengurangi stigma, dan mempromosikan kesetaraan serta inklusi sosial yang lebih luas. Pendidikan inklusif menekankan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang setara dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat, sehingga membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Metode kualitatif merupakan metode penelitian komprehensif yang dilakukan berdasarkan metode objektif dan reflektif. Landasan pemikiran dalam penelitian kualitatif berasal dari Max Weber yang menyatakan bahwa objek

penelitian sosiologi bukanlah fenomena sosial, melainkan makna tindakan individu yang memungkinkan terjadinya fenomena sosial, yaitu pemikiran. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menyelidiki fenomena sejak awal, selalu terbuka, dan melibatkan strategi dan orang lain dalam pelaksanaan penelitian terstandar.

Metode penelitian kualitatif lebih umum digunakan oleh peneliti di bidang humaniora, ilmu sosial, dan ilmu agama. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk kegiatan penelitian yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, fungsi organisasi, dan kegiatan sosial ekonomi. Hasil kegiatan penelitian kualitatif berupa uraian rinci tentang bahasa, tulisan, atau perilaku yang diamati pada individu, kelompok, komunitas, atau organisasi tertentu dalam situasi atau konteks tertentu dari subjek penelitian yang menyeluruh.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Anak Penyandang Disabilitas

Menurut Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah disahkan dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama. Ketika dihadapkan pada berbagai hambatan, keterbatasan ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan orang lain. Konvensi ini tidak memberikan batasan tentang penyandang cacat. Dalam konvensi ini, penyandang cacat disebut sebagai penyandang disabilitas. Namun, karena kecacatan yang mereka sandang, penyandang disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, dan sosial untuk mengembangkan diri secara maksimal.

Istilah "penyandang disabilitas" di Indonesia muncul setelah adanya diskusi oleh Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) yang bertajuk "Diskusi Pakar untuk Memilih Terminologi Pengganti Istilah Penyandang Cacat" pada 19-20 Maret 2010 di Jakarta. Diskusi ini dihadiri oleh pakar HAM, pakar bahasa, pakar komunikasi, pakar filsafat, pakar psikologi, pakar penyandang cacat, pakar isu rentan, perwakilan Kementerian Sosial, dan komisioner Komnas HAM. Hasil diskusi tersebut berhasil menemukan dan menyepakati terminologi "penyandang disabilitas" sebagai pengganti istilah "penyandang cacat".

Peraturan perundang-undangan di Indonesia merumuskan pengertian penyandang disabilitas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang

Penyandang Cacat, yang menyatakan bahwa, “Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan tantangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya,” yang terdiri dari:

- a. Penyandang cacat fisik
- b. Penyandang cacat mental
- c. Penyandang cacat fisik dan mental

2. Permasalahan Anak Penyandang Disabilitas

Disabilitas memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk fisik, pendidikan, vokasional, dan ekonomi. Selain itu, disabilitas juga dapat menimbulkan masalah psikososial, seperti rendah diri atau sebaliknya merasa terlalu penting, mudah tersinggung, terkadang agresif, pesimis, sulit mengambil keputusan, menarik diri dari lingkungan, cemas berlebihan, ketidakmampuan menjalin hubungan dengan orang lain, serta ketidakmampuan mengambil peran sosial.

Sunardi mengidentifikasi permasalahan anak penyandang disabilitas dari empat aspek:

- a. Aspek dari penyandang disabilitas itu sendiri meliputi:
 - 1) Hambatan fisik mobilitas
 - 2) Hambatan mental psikologis
 - 3) Hambatan Pendidikan
 - 4) Hambatan produktivitas
 - 5) Hambatan sosial ekonomi
 - 6) Hambatan fungsi sosial
- b. Aspek dari pihak keluarga, meliputi:
 - 1) Sikap protektif yang berlebihan, menghambat perkembangan optimal
 - 2) Pengetahuan yang rendah
 - 3) Diskriminasi karena kurang kesadaran tentang Pendidikan
 - 4) Sikap malu atau merasa berdosa yang mengakibatkan memanjakan anak secara berlebihan
- c. Aspek dari masyarakat, meliputi:
 - 1) Keraguan terhadap kemampuan atau potensi penyandang disabilitas
 - 2) Sikap acuh tak acuh
 - 3) Lemahnya pengelolaan organisasi yang menangani kecacatan
 - 4) Terbatasnya lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas

- d. Aspek dari pemerintah, dimana undang-undang penyandang disabilitas belum dijalankan dengan baik.

Menurut Departemen Sosial, anak penyandang disabilitas merupakan kelompok sosial yang rentan terhadap masalah-masalah sosial, yang menghambat tercapainya kesejahteraan sosial. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- a. Hambatan fisik mobilitas dalam kegiatan sehari-hari
- b. Gangguan mental psikologis yang menyebabkan rasa rendah diri, mengasingkan diri, dan kurang percaya diri
- c. Hambatan komunikasi dalam kegiatan sehari-hari
- d. Hambatan dalam melaksanakan fungsi sosial
- e. Hambatan dalam keterampilan kerja produktif
- f. Kondisi sosial ekonomi yang rawan

Selain itu, masyarakat juga sering kali memiliki sikap kurang menguntungkan terhadap anak penyandang disabilitas, seperti:

- a. Keraguan terhadap kemampuan atau potensi anak penyandang disabilitas
- b. Sikap masa bodoh terhadap permasalahan anak penyandang disabilitas
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menangani permasalahan anak penyandang disabilitas
- d. Lemahnya organisasi sosial yang bergerak di bidang disabilitas
- e. Terbatasnya fasilitas umum yang dapat digunakan oleh anak penyandang disabilitas.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penanganan yang tepat agar anak penyandang disabilitas dapat menjalankan peran dan fungsi sosialnya sesuai dengan derajat dan jenis disabilitas yang mereka alami, sehingga dapat hidup lebih baik.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menyatakan bahwa “setiap penyandang cacat mempunyai hak yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.” Ini termasuk aspek pendidikan yang menjadi kebutuhan semua orang. Terkait dengan peluang untuk memperoleh pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dalam Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Penjelasan tentang pendidikan khusus ini disebutkan pada Pasal 32 ayat 1, yang menyatakan bahwa pendidikan bagi peserta didik dengan kesulitan dalam mengikuti

proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan. Meskipun demikian, pada Pasal 51 dijelaskan bahwa anak penyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan bersama dalam mengakses pendidikan biasa. Pasal ini memberi peluang bagi anak penyandang cacat fisik (anak berkebutuhan khusus) untuk memilih antara mengikuti pendidikan khusus atau mengikuti pendidikan seperti anak-anak lain yang tidak cacat. Meskipun secara yuridis telah ada peraturan yang mengatur dan memberikan peluang akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, namun peluang tersebut belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh penyandang disabilitas. Untuk mengatasi permasalahan sosial anak penyandang disabilitas, salah satu solusinya adalah melalui pendidikan inklusi.

3. Pengertian Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus, termasuk anak penyandang disabilitas. Pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang mengintegrasikan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal untuk belajar bersama. Menurut Hildegun Olsen pendidikan inklusi berarti sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Ini mencakup anak-anak penyandang cacat, anak-anak berbakat, anak-anak jalanan, pekerja anak, anak dari populasi terpencil atau berpindah-pindah, serta anak dari populasi etnis minoritas, linguistik, atau budaya, dan anak-anak dari area atau kelompok yang kurang beruntung atau terpinggirkan.

Staub dan Peck menjelaskan pendidikan inklusi sebagai penempatan anak berkelainan ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Ini menunjukkan bahwa kelas reguler adalah tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan, apapun jenis dan gradasi kelainannya. Sementara itu, Sunardi menyatakan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama teman seusianya. Oleh karena itu, ditekankan adanya perubahan dalam sekolah, sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, dengan sumber belajar yang memadai dan dukungan dari semua pihak, termasuk siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitarnya.

Alimin menjelaskan bahwa pendidikan inklusi adalah proses merespon kebutuhan beragam dari semua anak melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya, dan masyarakat, serta mengurangi eksklusivitas dalam pendidikan. Pendidikan inklusif

mencakup perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan, struktur, dan strategi yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua anak sesuai dengan kelompok usianya. Pendidikan inklusif juga dipandang sebagai bentuk kepedulian dalam merespon spektrum kebutuhan belajar peserta didik yang lebih luas, sehingga baik guru maupun siswa merasa nyaman dalam keberagaman dan melihatnya sebagai tantangan serta pengayaan dalam lingkungan belajar, bukan sebagai masalah. Pendidikan inklusif juga terus berkembang sebagai refleksi dari praktik nyata, dan harus terus beradaptasi untuk tetap relevan menghadapi tantangan pendidikan dan hak asasi manusia.

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan serta potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan umum bersama peserta didik lainnya.

Berdasarkan pengertian dan dasar pendidikan inklusi tersebut, pendidikan inklusi dapat dikatakan sebagai sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas reguler bersama teman seusianya. Konsep pendidikan inklusi mencakup seluruh aspek yang terkait dengan keterbukaan dalam menerima anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara. Pendidikan inklusi tidak hanya penting untuk menampung anak berkebutuhan khusus dalam satu sekolah yang terpadu, tetapi juga dimaksudkan untuk mengembangkan potensi mereka dan menyelamatkan masa depan mereka dari diskriminasi pendidikan yang cenderung mengabaikan anak-anak berkelainan.

Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan inklusi dapat dipandang sebagai bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti-diskriminasi, perjuangan untuk persamaan hak dan kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan, serta upaya strategis untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun, sekaligus mengubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi terjadi ketika peserta didik ditempatkan di kelas reguler berdasarkan ide dan pandangan hidup yang berbeda dari pandangan sebelumnya. Konsep inklusi didasarkan pada gagasan bahwa sekolah reguler harus menyediakan lingkungan belajar bagi seluruh peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka, apapun tingkat kemampuan atau kelainannya. Sekolah inklusi menyelenggarakan berbagai keterampilan terkait budaya, sosial, kelompok etnik, dan latar belakang sosial.

Menurut Mohammad Takdir Ilahi, tujuan pendidikan inklusi ada dua:

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik

4. Karakteristik Pendidikan Inklusi di Sekolah

Pendidikan inklusif memiliki beberapa karakteristik yang dapat dijadikan dasar layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Karakteristik tersebut meliputi:

- a. Kurikulum yang Fleksibel

Penyesuaian kurikulum dalam pendidikan inklusif tidak harus berfokus terlebih dahulu pada materi pembelajaran, tetapi yang paling penting adalah memberikan perhatian penuh pada kebutuhan anak didik. Materi pelajaran yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus harus sesuai dengan kurikulum yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kurikulum yang fleksibel harus menjadi prioritas utama untuk memberikan kemudahan kepada mereka yang belum mendapatkan layanan pendidikan terbaik, demi menunjang karir dan masa depan. Materi yang diberikan harus relevan dengan kebutuhan mereka, terutama yang berkaitan dengan keterampilan dan potensi pribadi mereka yang belum berkembang.

- b. Pendekatan Pembelajaran yang Fleksibel

Dalam aktivitas belajar mengajar, sistem pendidikan inklusif harus memberikan pendekatan yang memudahkan anak berkebutuhan khusus untuk memahami materi pelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan mereka.

- c. Sistem Evaluasi yang Fleksibel

Dalam melakukan penilaian, keseimbangan antara kebutuhan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal pada umumnya harus diperhatikan, karena anak berkebutuhan khusus memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan keseriusan dari guru dalam melakukan penilaian.

- d. Pembelajaran yang Ramah

Proses pembelajaran dalam pendidikan inklusif harus mencerminkan pembelajaran yang ramah. Pembelajaran yang ramah dapat memotivasi dan mendorong anak untuk terus mengembangkan potensi dan keterampilan mereka sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki.

Karakteristik dalam pendidikan inklusif juga mencakup beberapa aspek berikut:

a. Hubungan

Hubungan yang ramah dan hangat antara guru dan siswa. Contohnya, untuk anak tuna rungu, guru selalu berada di dekatnya dengan wajah terarah pada anak dan tersenyum. Pendamping kelas (orang tua) memuji anak tuna rungu dan membantu anak lainnya.

b. Kemampuan

Guru, peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda, serta orang tua sebagai pendamping.

c. Pengaturan Tempat Duduk

Pengaturan tempat duduk yang bervariasi, seperti duduk berkelompok di lantai membentuk lingkaran atau duduk di bangku bersama-sama sehingga mereka dapat melihat satu sama lain.

d. Materi Belajar

Berbagai bahan pembelajaran yang bervariasi untuk semua mata pelajaran. Contohnya, pembelajaran matematika disampaikan melalui kegiatan yang lebih menarik, menantang, dan menyenangkan melalui bermain peran menggunakan poster dan wayang untuk pelajaran bahasa.

e. Sumber

Guru menyusun rencana harian dengan melibatkan anak. Contohnya, meminta anak membawa media belajar yang murah dan mudah didapat ke dalam kelas untuk dimanfaatkan dalam pelajaran tertentu.

f. Evaluasi

Penilaian melalui observasi dan portofolio, yaitu mengumpulkan dan menilai karya anak dalam kurun waktu tertentu.

5. Manfaat Pendidikan Inklusi Pada Anak Penyandang Disabilitas

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia tetap menimbulkan kontroversi, meskipun praktek sekolah inklusif menawarkan berbagai manfaat yang signifikan. Dalam pendidikan inklusi, layanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan individu anak secara personal dalam upaya menyatukan mereka dalam konteks pembelajaran yang bersamaan. Pendekatan ini tidak memandang anak dari perspektif ketidakmampuannya atau kecacatannya, melainkan lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan khusus yang

berbeda-beda antara satu anak dengan yang lain. Beberapa alasan penting mengapa pendidikan inklusi diperlukan dalam layanan pendidikan bagi anak luar biasa antara lain:

- a. Semua anak, baik yang memiliki cacat maupun tidak, memiliki hak yang sama untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak lain.
- b. Anak seharusnya tidak diberi label atau dibedakan secara ketat, melainkan dipandang sebagai individu yang memiliki kesulitan dalam belajar.
- c. Penelitian menunjukkan bahwa anak cenderung mencapai hasil yang baik secara akademik dan sosial ketika mereka berada dalam lingkungan yang inklusif.
- d. Tidak ada layanan pendidikan di sekolah khusus yang mampu memberikan pengalaman yang sama dalam menghadapi tantangan pendidikan di sekolah umum.
- e. Semua anak membutuhkan pendidikan yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan hubungan antarpribadi dan mempersiapkan mereka untuk hidup dalam masyarakat.
- f. Hanya pendidikan inklusi yang memiliki potensi untuk mengurangi rasa takut, membangun persahabatan, tanggung jawab, dan pemahaman diri.

Dengan memperhatikan beberapa alasan ini, pendidikan inklusi dapat memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan tingkat kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan sementara, permanen, maupun kultural. Anak-anak dengan keberagaman kebutuhan belajar dapat mengalami pertumbuhan positif dalam keterampilan sosial dan kesiapan hidup mereka ketika dimasukkan dalam lingkungan sekolah yang inklusif. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan inklusi juga mengajarkan nilai-nilai sosial seperti kesetaraan dan penerimaan terhadap perbedaan. Sekolah inklusi tidak hanya menerapkan konsep kesetaraan dalam pendidikan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak-anak, yang membantu dalam pengembangan mereka secara pribadi dan akademis.

Partisipasi aktif masyarakat dan kemandirian merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi sekolah inklusi. Kolaborasi antara masyarakat dan pendidik dalam menciptakan komunitas yang hangat, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan sangat mendukung pembelajaran inklusif yang efektif. Selain itu, peran orang tua dalam mendukung perencanaan kurikulum dan pembelajaran di rumah juga krusial dalam meningkatkan pengalaman pendidikan anak di lingkungan inklusif.

KESIMPULAN

Anak penyandang Disabilitas adalah bagian integral dari masyarakat dan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam lingkungan mereka. Mereka seharusnya mendapatkan dukungan yang diperlukan melalui sistem pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan pelayanan sosial yang tersedia untuk semua. Sebagai bagian dari upaya mencapai kesetaraan, fasilitas dan infrastruktur harus tersedia untuk membantu penyandang Disabilitas agar dapat mengambil peran penuh sebagai anggota masyarakat yang produktif.

Pendidikan inklusi bertujuan untuk memastikan kesetaraan hak dan akses pendidikan bagi semua warga negara. Meskipun implementasi pendidikan inklusi masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan, hal ini harus dihadapi dengan bijaksana agar tidak menghambat upaya menuju pendidikan inklusif yang sesuai dengan prinsip-prinsip filosofis yang mendasarinya. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan komitmen tinggi dan kerja keras melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Dengan demikian, harapan utama dari semua upaya ini adalah untuk memastikan bahwa penyandang Disabilitas dapat mencapai kesejahteraan penuh dan menikmati hak-hak mereka sebagai warga negara secara efektif dan segera.

DAFTAR PUSTAKA

- Tarmansyah. (2020). *Inklusi pendidikan untuk semua*. Jakarta: Depdiknas.
- Sunardi. (2021). *Kecenderungan dalam pendidikan luar biasa*. Jakarta: Dikti, Dekdikbud.
- Sosial, D. (2009). *Pedoman advokasi sosial penyandang cacat*. Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.
- Palijama, F. (2020). *Rehabilitasi sosial anak cacat (Penerapan prinsip pengasuhan anak cacat oleh Panti Sosial Bina Asih Leleani di Kota Surakarta)* (Tesis, Program Pascasarjana, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Bidang Ilmu Sosial Universitas Indonesia).
- Ilahi, M. T. (2023). *Pendidikan inklusif*. Yogyakarta: ArRuzz Media.
- Direktorat Pendidikan Luar Biasa. (2004). *Mengenal pendidikan terpadu*. Ditjend. Pend. Dasar dan Menengah Dep. Pend. Nasional.
- Delphie, B. (2019). *Pembelajaran anak berkebutuhan khusus*. Sleman: PT Intan Sejati.
- Alimin, Z. (2005). *Memahami pendidikan inklusif dan anak berkebutuhan khusus*. Makalah tidak diterbitkan. Bandung: Jurusan PLB FIP UPI.